

**EKSISTENSI KEBANGSAAN DAN PERWUJUDAN KEINDONESIAAN  
DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA:  
KASUS KALIMANTAN BARAT<sup>1</sup>**

***THE EXISTENCE AND MANIFESTATION OF INDONESIAN  
NATIONHOOD IN INDONESIA-MALAYSIA BORDER AREA: CASE OF  
WEST KALIMANTAN***

**Nina Andriana**

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta  
E-mail: andriana1183@yahoo.com

Diterima: 17 Februari 2015; direvisi: 10 Mei 2015; disetujui: 15 Juni 2015

***Abstract***

*The conditions of the border area that is full of “limitedness”, indicate the people in that region are more oriented to the neighboring countries, because neighboring countries are better able to overcome the limitations that they have. The presumption that a sense of nationalism in border communities is fragile is not entirely wrong, but also not entirely correct. Many factors that cause a sense of nationalism border communities strong or otherwise, weak. The state has an important role in growing and maintaining a sense of nationality communities across the country, especially in border areas. This paper presents a portrait of a sense of nationhood in the comprehension and daily life of border communities. In the end, this paper aims to give a recommendation to the government and relevant stakeholders, that approach to cultivate and nurture a sense of national border communities must be more innovative and also civilized.*

**Keywords:** *Border Areas, Nationalism, Government Role.*

**Abstrak**

Kondisi wilayah perbatasan yang penuh dengan “keterbatasan” menunjukkan indikasi mudahnya masyarakat di wilayah tersebut untuk lebih berorientasi kepada negara tetangga, karena negara tetangga relatif lebih mampu mengatasi keterbatasan yang mereka alami. Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuh tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan menjadi kuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan masyarakat diseluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan ini menyajikan potret rasa kebangsaan dalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya, tulisan ini ingin memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwa pendekatan untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatif dan humanis serta beradab.

**Kata Kunci:** Wilayah Perbatasan, Nasionalisme, Peran Pemerintah.

---

<sup>1</sup> Tim peneliti terdiri atas Dr. Firman Noor (Koordinator), Dr. Asvi Warman Adam, Syafuan Rozi, S.IP, M.Si., Nina Andriana, S.IP, M.Si., Wasisto Raharjo Djati, S.IP.

## Pendahuluan

Persoalan kebangsaan di Indonesia tidak hadir baru-baru ini saja. Sejak zaman kemerdekaan hingga masa otoriter di era Orde Baru, persoalan-persoalan kebangsaan terus bermunculan. Pada era reformasi, kehadiran demokrasi yang bagi sebagian kalangan diyakini dapat menguatkan sentimen kebangsaan<sup>2</sup>, nampak belum diperjuangkan secara maksimal dalam mengatasi problematika kebangsaan di beberapa wilayah di tanah air. Fenomena ketergerusan rasa kebangsaan justru tetap masih menggejala di banyak wilayah dan komunitas, dengan pelbagai ekspresi dan pengejawantahannya.

Belakangan, tidak saja sentimen kelokalan dan primordial yang mencuat, namun hadir pula sikap dan pandangan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan eksistensi keindonesiaan. Kajian Tim Nasionalisme pada tahun-tahun sebelumnya (2007-2012) menunjukkan bahwa selain separatisme, persoalan lain yang saat ini patut mendapat perhatian adalah munculnya sebuah fenomena keterasingan dan bahkan pengabaian akan nilai-nilai kebangsaan dan eksistensi negara atau keindonesiaan dalam kehidupan keseharian di sebagian masyarakat kita, yang pada gilirannya berpotensi memudarkan pemahaman dan penyikapan atas hakekat kebangsaan dan keindonesiaan itu sendiri.

Meski sampai dengan beberapa tahun ke depan, bisa jadi separatisme secara fisik tidak terjadi di masyarakat tersebut, namun separatisme dalam makna keterasingan akan nilai-nilai kebangsaan di beberapa daerah berpotensi semakin mengkristal. Situasi ini bukan tidak mungkin akan dapat meninggalkan persoalan yang sama sulit dan besarnya dengan separatisme dalam konteks fisik di masa yang akan datang.

Sikap abai atas rasa kebangsaan dan keindonesiaan ini tentu saja dapat terjadi dimana saja. Mulai dari wilayah perkotaan yang paling kosmopolitan dan modern, hingga wilayah pedalaman yang paling terasing dan tertinggal. Pada segenap wilayah potensi itu sejatinya ada. Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar

untuk situasi tersebut adalah wilayah perbatasan. Dalam konteks perbatasan, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia patut mendapat perhatian.

Beberapa bagian wilayah perbatasan diyakini oleh beberapa kalangan berpotensi besar untuk mengalami ketergerusan atau erosi rasa kebangsaan yang cukup serius.<sup>3</sup> Kenyataannya memang pada wilayah perbatasan yang meliputi tiga provinsi (Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat), delapan kabupaten dengan belasan kecamatan ini, memang memiliki tantangan tersendiri dalam soal pemantapan, pengelolaan dan pemeliharaan rasa kebangsaan.

Hasil penelitian pada tahun 2013 di wilayah Kalimantan Utara, misalnya, memperlihatkan bahwa salah urus pemerintahan yang berdampak pada masih adanya ketertinggalan dalam berbagai bidang dan sikap negara jiran yang cukup memberikan asa menjadi semacam kekuatan sentrifugal yang dikhawatirkan bisa melunturkan rasa kebangsaan ketimbang memperkuatnya. Secara umum, ketidakhadiran *nasion*, yang tercermin dari rendahnya keadaban dan kepatutan hidup akibat salah urus negara, dan sikap negara jiran yang mengambil keuntungan dari pelbagai kesulitan hidup menjadi kombinasi yang cukup menyulitkan bangsa ini dalam mengembangkan dan memelihara rasa kebangsaan.

Pada tahun 2013 penelitian dilaksanakan di dua Kabupaten yakni, Malinau dan Nunukan. Pada penelitian tahun 2014, pembahasan difokuskan pada wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) yang secara administratif memiliki 98 desa, 14 kecamatan dan lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia). Kelima kabupaten itu adalah Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Kalbar berbatasan langsung dengan Sarawak dengan garis perbatasan yang membentang secara horizontal sepanjang 847,3 km.

Amatan sekilas atas wilayah Kalimantan Barat cukup memperlihatkan relevansi kajian kebangsaan ini, mengingat beberapa kejadian atau kecenderungan yang menunjukkan terpinggirkannya rasa kebangsaan dan

<sup>2</sup> Ghia Nodia, "Nasionalisme dan Demokrasi," dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner (Eds.), *Nasionalisme, Konflik Etik, dan Demokrasi*, (Bandung: ITB, 1998).

<sup>3</sup> Maria Dominique, *Ancaman di Batas Negeri Kostrad di Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia)*, (Jakarta: Rene-Book dan Mardom untuk Kostrad, 2012).

keindonesiaan. Penelitian yang dilakukan Ririh M. Safitri, dengan sampel masyarakat Badau, misalnya, memperlihatkan munculnya “identitas baru” yang cukup mengkhawatirkan bagi eksistensi keindonesiaan dan kebangsaan di sana. Peran negara yang lemah atau disfungsi dan ketergantungan masyarakat terhadap negara jiran yang tinggi telah menyebabkan munculnya norma-norma baru yang lebih “praktis” dan relevan dalam keseharian hidup mereka, yang sayangnya kerap berarti tereduksinya identitas mereka sebagai orang Indonesia. Dalam kesehariannya, menurut catatan Ririh, masyarakat Badau tidak saja cenderung meremehkan aturan main yang ditetapkan oleh negara, namun juga tidak terlalu mempedulikan kebangsaan mereka dan bahkan tidak menunjukkan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia<sup>4</sup>.

Beberapa kasus kontemporer lainnya yang terjadi di perbatasan Provinsi Kalbar dengan Sarawak seolah juga mengonfirmasi potensi ketergerusan rasa kebangsaan. Fenomena kepemilikan identitas ganda yang kerap berlanjut dengan perpindahan kewarganegaraan masih kerap terjadi. Keterdesakan untuk menyambung hidup biasanya menjadi awal ini semua. Begitu pula dengan keterasingan atas simbol-simbol kebangsaan juga menjadi sesuatu yang cukup menggejala, termasuk keterasingan terhadap lagu kebangsaan<sup>5</sup> dan lambang negara. Dalam sebuah adegan film pemenang Festival Film Indonesia 2012 berjudul “Tanah Surga Katanya”, yang berangkat dari kisah nyata, diperlihatkan bagaimana bendera Merah Putih nampak tidak berarti dan tidak dimengerti oleh masyarakat di wilayah pedalaman Entikong. Bahkan dalam sebuah film dokumenter berjudul “Tapal Batas” diperlihatkan sosok warga perbatasan yang asing terhadap lambang Burung Garuda Pancasila.

Dalam kehidupan keseharian, sebagian wilayah di Kalbar malah masih menggunakan

waktu yang berlaku di Malaysia. Menurut Kepala Dusun Seridan, Desa Laja Sandang, Kecamatan Empanang, Kapuas Hulu Hendri Bulan:

“Dari dulu memang kita menggunakan jam Malaysia. Sekarang pun ada yang masih, terutama orang-orang tua. Makanya kalau orang-orang tua bilang jam 08.00, itu artinya jam 07.00 waktu Indonesia... Baru sekitar satu tahun ini mulai menggunakan waktu Indonesia. Itu pun hanya kalangan muda saja...”<sup>6</sup>

Dalam dunia perdagangan, masyarakat di sana nampak terbiasa menggunakan mata uang Ringgit Malaysia.<sup>7</sup> Kebanyakan merekapun lebih berorientasi berdagang dan bekerja di Malaysia ketimbang di negeri sendiri.<sup>8</sup> Tidak itu saja, mereka pun nampak lebih mempercayakan pendidikan dan masa depan anak cucunya kepada negara jiran itu. Terbukti masih banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya di Malaysia, dengan harapan bahwa suatu saat mereka dapat bekerja dan tinggal dengan layak di sana. Alasan klasik terjadinya hal ini adalah karena pendidikan yang murah dan berkualitas dan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak di kemudian hari.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan situasi di atas, sebuah penelitian yang dapat memotret secara langsung dan objektif tentang kondisi kebangsaan, tanpa berpretensi untuk menghakimi seseorang atau sekelompok orang, perlu untuk dikembangkan. Penelitian ini juga sebagai media konfirmasi atas pemberitaan dan asumsi yang berkembang di wilayah perbatasan. Berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, ada sebagian pemberitaan dan asumsi yang memang tepat, namun ada pula yang merupakan mitos atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Penelitian ini pada akhirnya

<sup>6</sup> <http://www.equator-news.com/kapuas-hulu/20121203/masyarakat-perbatasan-masih-berpatokan-waktu-malaysia>, diakses pada tanggal 7 Januari 2014.

<sup>7</sup> Djibril Muhammad, “Warga RI di Perbatasan Lebih Mudah Bertransaksi dengan Ringgit,” 9 Desember 2011, <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/12/09/lvxxkb7-warga-ri-di-perbatasan-lebih-mudah-bertransaksi-dengan-ringgit>, diakses pada tanggal 7 Januari 2014.

<sup>8</sup> “Pemerintah Harusnya Malu...”, *op.cit.*

<sup>9</sup> Nurul Hayat (Ed), “Warga Perbatasan Masih Sekolahkan Anak Di Malaysia,” 13 Oktober 2013. <http://www.antarakalbar.com/berita/317022/warga-perbatasan-masih-sekolahkan-anak-di-malaysia>, diakses pada tanggal 7 Januari 2014.

<sup>4</sup> Ririh M. Safitri, *Disfungsi Negara di Wilayah Perbatasan: Studi tentang Melemahnya Nasionalisme di Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013).

<sup>5</sup> “Pemerintah Harusnya Malu, Warga di Perbatasan Rame-rame Cari Kerja di Malaysia,” 30 April 2012. <http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-harusnya-malu-warga-di-perbatasan-rame-rame-cari-kerja-di-malaysia/19635>, diakses pada tanggal 7 Januari 2014.

diharapkan dapat membawa pemahaman atas situasi kebangsaan masyarakat di perbatasan era kontemporer secara obyektif.

Kajian ini bertujuan menganalisa kondisi atau kualitas rasa kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan, melalui “ekspresi kebangsaan” dalam keseharian masyarakatnya lalu pemahaman atas kebangsaan itu sendiri. Pada akhirnya akan dihasilkan rekomendasi yang mampu melihat peluang dan kendala tumbuhnya rasa kebangsaan di wilayah perbatasan.

## Kerangka Pemikiran

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan bagian dari penelitian serial yang telah berlangsung sejak tahun 2013, atau dengan kata lain merupakan kelanjutan atau bagian kedua dari penelitian yang sama namun dengan lokasi penelitian yang berbeda, maka kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini secara umum tidak banyak berbeda. Konsep-konsep yang digunakan dalam hal ini adalah konsep kebangsaan, indikasi kebangsaan, *nation* dan upaya menghadirkannya serta makna perbatasan dalam konteks kebangsaan.

### 1. Konsep Kebangsaan

Penelitian ini secara mendasar berupaya melihat pertumbuhan kebangsaan sebagai sesuatu yang dikembangkan oleh para intelegensia-pejuang yang kemudian disebut sebagai para bapak bangsa. Dalam kondisi ini, peran mereka dalam meramu pelbagai pendekatan dan argumentasi untuk menguatkan hakekat kebangsaan yang dikehendaki demikian kental dan dominan. Merekalah yang mengejawantahkan amanat penderitaan rakyat, yang secara umum masih belum banyak memahami secara persis situasi yang terjadi dan arah perkembangannya.

Hal ini sejalan dengan pandangan kaum instrumental yang melihat rasa kebangsaan sebagai hasil kreatif elit politik untuk menumbuhkan sebuah identitas kolektif dengan mengaitkannya dengan berbagai hal termasuk mitologi, harga diri, kesejarahan, hingga kepentingan material. Hasil rekayasa inilah yang di kemudian hari menjadi pembenar atas terbentuknya batas antara “kami” dan “mereka”

sekaligus membentuk sebuah identitas baru untuk membenarkan keberadaan sebuah bangsa. Dengan kata lain, semangat pembentukan identitas atas dasar kesamaan masa lalu dan kepentingan ke depan yang memberi makna atas hakekat kebangsaan lebih kuat dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan kesamaan kultural.

Sejalan dengan itu, definisi nasionalisme atau rasa kebangsaan pada penelitian ini, yang juga digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, adalah: “kemauan untuk rela bersatu atas dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa depan di mana semangat kemanusiaan menjadi landasannya. Secara lebih spesifik dalam makna keindonesiaan hal itu dikaitkan dengan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi yang didampingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan”.<sup>10</sup>

Akar dari konsep itu berangkat dari berbagai definisi mengenai kebangsaan yang dikemukakan oleh beberapa figur terkenal dalam kajian mengenai kebangsaan. Diantaranya adalah definisi yang dikembangkan oleh filsuf Perancis Ernest Renan. Dalam bukunya “Apakah Bangsa Itu?”, Renan menyimpulkan bahwa nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersatu tanpa paksaan yang dituntun oleh obsesi mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang dianggap luhur<sup>11</sup>, yang pada akhirnya menciptakan sebuah identitas *nasion* atau identitas sebuah bangsa.

Guibernau dan Rex sedikit banyak juga memiliki pandangan yang hampir sama, yaitu bahwa nasionalisme merupakan kesediaan bersatu secara sukarela dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan (*trans-etnis, pen*) dengan dilandasi oleh semangat mengedepankan hak-hak warga di dalamnya<sup>12</sup>.

Tokoh lain yang digunakan untuk melandasi konsep kebangsaan tim ini adalah Gellner, menekankan akan arti keterikatan budaya yang

<sup>10</sup> Firman Noor (Ed), *Nasionalisme, Demokratisasi dan Sentimen Primordialisme*, (Jakarta: P2P LIPI, 2007).

<sup>11</sup> Ernest Renan, “Qu’est-ce qu’une nation” (What is *nasion*?), terjemahan oleh Martin Thom dalam H.K Bhabha ed, *Nation and Nationalism*, (London and New York: Routledge, 1990).

<sup>12</sup> Montserrat Guibernau dan John Rex, (Eds.), *The Ethnicity Reader Nationalism, Multiculturalism and Migrations*, (Cambridge: Polity Press, 1997), hlm. 8.

sama (*shared culture*) yang menyatukan sesama anak bangsa. Gellner mengatakan:

*“Nationalism is a political principle which maintains that similarity of culture is the basic social bond. Whatever principles of authority may exist between people depend for their legitimacy on the fact the members of the group concerned are of the same culture... only members of the appropriate culture may join the unit in question, and all of them must do so...”*<sup>13</sup>.

Dalam kaitannya dengan peran *nasion* atau keindonesiaan, menurut pandangan Mochtar Pabottingi adalah terkait erat dengan upaya-upaya untuk menghadirkan hakekat keindonesiaan di seluruh penjuru negeri. Tujuan dasarnya adalah tidak lain untuk menciptakan dan menyebarkan keadilan dan keadaban yang lebih konkret dan bermartabat di seluruh nusantara. Perwujudan *nasion* ini merupakan langkah selanjutnya setelah nasionalisme telah terbentuk.<sup>14</sup>

## 2. Indikasi kebangsaan

Berbagai parameter telah dikembangkan untuk mengukur apa yang disebut kadar atau kualitas kebangsaan, yang darinya dapat disimpulkan kedudukan atau keberadaan kebangsaan di sebuah komunitas atau wilayah. Suatu hal yang patut dicermati dengan bijak bahwa parameter ini tidak bisa dilepaskan dari cara kita memahami hakekat kebangsaan itu sendiri. Dari berbagai definisi dan juga berdasarkan amatan atas perkembangan konsep kebangsaan, penelitian ini memiliki tiga indikator untuk menakar eksistensi rasa kebangsaan.

*Pertama*, rasa kebangsaan senantiasa terkait dengan upaya menumbuhkan dan memelihara “identitas kolektif yang mengikat dan menumbuhkan rasa persaudaraan sebangsa”. Identitas ini dapat dilandasi oleh ikatan primordial (etnis dan agama), mitos, sejarah kebesaran masa

<sup>13</sup> Ernest Gellner, *Nationalism*, (London: Phoenix, 1997), Peter Faber, “Evolving Idea of Nationalism”, hlm. 4. [www.isn.ethz.ch](http://www.isn.ethz.ch), diakses pada tanggal 14 Januari 2014.

<sup>14</sup> Mengikuti pandangan Gellner, menurut Pabottingi nasionalisme sejatinya hadir dan diperjuangkan hanya selama *nasion* belum terwujud. Lihat Ernest Gellner, *Thought and Change*, (Chicago: University of Chicago Press, 1965), hlm. 169.

lalu, atau nilai-nilai ideal, yang pada akhirnya menjelma sebagai pembentuk rasa persaudaraan yang kental. Secara internal identitas ini menyebabkan hadirnya rasa nyaman dan aman, dan secara eksternal menciptakan batasan antara sebuah komunitas kebangsaan dengan komunitas lainnya. Mereka yang tidak sepakat dengan identitas kolektif ini kerap dipandang sebagai pihak yang tidak cukup berkomitmen untuk membela eksistensi kebangsaan, sehingga layak disingkirkan atau diperangi.

*Kedua*, rasa kebangsaan kerap berarti adanya sebuah “obsesi dan cita-cita bersama untuk membangun kebaikan dan kebanggaan kolektif”. Adanya obsesi menciptakan definisi tentang apa yang menjadi tujuan berbangsa? Lalu apa yang harus dilakukan untuk mencapai obsesi tersebut? Siapa saja yang harus bersama mewujudkan? dan kepada siapa upaya itu diabdikan? Dalam bentuk konkretnya “obsesi” ini mewujudkan pada kesadaran kolektif yang dibimbing oleh ideologi dan konstitusi negara. Sementara itu, dalam soal “membangun kebanggaan kolektif” rasa kebangsaan berarti sebuah kesadaran untuk mendahulukan kepentingan danewartakan keunggulan bangsanya, termasuk keunggulan atas segenap karya cipta bangsa.

*Ketiga*, eksistensi rasa kebangsaan umumnya terkait dengan “pemahaman dan penghargaan akan simbol-simbol kenegaraan beserta otoritas politik didalamnya”. Dalam level ini, rasa kebangsaan hadir dalam bentuknya yang simbolis. Penghargaan terhadap bendera, lagu kebangsaan, letak geografis, hingga pengetahuan akan pimpinan politik dan tokoh-tokoh serta pahlawan negara tercakup didalamnya.

Bagi sebagian kalangan, level relevansi ketiga indikator itu tidak cukup dan mengandung banyak kontroversi serta terlalu menyederhanakan masalah. Namun demikian, ketiganya kerap hadir manakala rasa kebangsaan itu dibincangkan atau didebatkan. Atribut ideologis, sentimen atau rasa dan simbol kebangsaan, dengan demikian jelas tidak dapat dinafikan saat menakar eksistensi kebangsaan sebuah komunitas.

## 3. Nasion dan Upaya Menghadirkannya

Menurut Gellner, sebuah *nasion* mewujudkan saat sebuah komunitas dengan budaya yang

sama—termasuk kesamaan dalam konteks sistem ide, simbol, perkumpulan dan cara bertingkah laku dan berkomunikasi—mengakui bahwa mereka terikat oleh rasa persaudaraan atas dasar kebangsaan.<sup>15</sup> Dalam makna pengakuan sukarela itu, maka *nasion* atau bangsa adalah sebuah hasil dari kesepakatan luhur di antara mereka yang tinggal di dalamnya.

*Nasion* bukanlah sekedar identitas, melainkan sebuah komitmen untuk hidup bersama dan obsesi untuk mewujudkan kepentingan yang sama. Dalam bahasa Pabottingi, *nasion*<sup>16</sup> adalah “Kolektivitas politik egaliter-otosentris, yang kontermus dengan wilayah politiknya serta lahir dari-atau rujukan bersama pada rangkaian dialektika serta aksiden sejarah yang sarat makna dengan proyeksi eksistensial tanpa batasan waktu ke masa depan”<sup>17</sup>. Dengan demikian, inti dari *nasion* adalah kerelaan untuk hidup bersama. Menurut Pabottingi, *nasion* secara lebih spesifik, atau dalam makna yang lebih praksis, berarti sebuah penghargaan kolektif sekaligus pengakuan atas solidaritas, inklusivisme, keadaban, kesaling-percayaan, dan pluralitas. Kehadiran *nasion* merupakan kehadiran kelimanya yang dapat terjadi melalui sebuah kerja-kerja konkret. Kelima prinsip itu pada hakekatnya merupakan nilai-nilai dasar yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya.<sup>18</sup>

Untuk mewujudkan *nasion* dibutuhkan seperangkat sistem, institusi dan agensi. Dalam hal ini kita berarti berbicara mengenai institusi-institusi yang relevan dan otoritatif baik dalam makna politik ataupun kapabilitas untuk bersama-sama mewujudkannya. Melalui keberadaan berbagai institusi itu, kelima prinsip dasar tersebut harus diwujudkan, melalui program dan aksi yang konkret. Inilah yang disebut dalam penelitian ini sebagai “program-program

keindonesiaan”. Keberadaannya dapat dipandang sebagai bagian dari upaya “rekayasa” sosial dan politik yang menandai hadirnya keindonesiaan dalam sebuah wilayah. Terkait dengan daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia, adanya kemiskinan yang berkelanjutan, lemahnya SDM yang terus menggejala, dan segenap bentuk keterbelakangan menjadi bukti dari absennya program-program keindonesiaan. Dalam kondisi sedemikian, tidak mengherankan bangun keindonesiaan itu kerap menjadi demikian ringkih.

#### 4. Makna Perbatasan dalam Konteks Kebangsaan

Pembentukan sebuah perbatasan pada dasarnya lebih merupakan hasil dari kerja-kerja legal-politik dan sosial untuk membentuk apa yang disebut “kategori sosial”, ketimbang sebagai upaya pengukuhan sebuah kepentingan budaya atau primordial.<sup>19</sup> Dengan sudut pandang itu, batas negara hadir lebih sebagai sebuah kesepakatan legal-politis untuk membentuk komunitas baru dan imajiner yang cenderung pada akhirnya terbebas dari batasan-batasan kultural. Sebagai konsekuensinya keberadaan perbatasan atau border kerap bertabrakan dengan batas-batas primordial. Terbukti, misalnya, saat ini semakin banyak negara yang sifatnya lintas etnis dan semakin banyak pula perbatasan yang melintasi dan memisahkan komunitas yang secara primordial atau mitologi sama.

Terlepas dari hubungan yang saling menguatkan atau melemahkan, persoalan nasionalisme atau rasa kebangsaan pada hakekatnya adalah persoalan pembentukan sebuah perbatasan. Dengan kata lain, kaitan antara perbatasan dan rasa kebangsaan adalah kuat. Pernyataan Conversi berikut ini menyimpulkan hubungan antara perbatasan dan nasionalisme, dimana dia mengatakan bahwa “*nationalism is both a process of border maintenance and creation*”<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>16</sup> *Nasion* adalah sebutan yang digunakan oleh Mochtar Pabottingi untuk mendefinisikan nasionalisme atau kebangsaan.

<sup>17</sup> Mochtar Pabottingi, *Lima Palang Demokrasi Satu Solusi: Rasionalitas dan Otosintresitas dari Sisi Historis-Politik di Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbang Politik dan Kewilayahan-LIPI, (Jakarta: PPW-LIPI, 2000), hlm. 12

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Lihat misalnya, Fredrick Barth (Ed), *Ethnic Groups and Boundaries: Social Organization of Cultural Difference*, (London: Allen & Unwin, 1969).

<sup>20</sup> Daniele Conversi, “Reassessing Current Theories Of Nationalism: Nationalism As Boundary Maintenance And Creation”, in *Nationalism and Ethnic Politics*, Vol.1, No. 1,

Dalam konteks perbatasan Indonesia-Malaysia, beberapa kajian menunjukkan bahwa perbatasan yang terbentuk tidak dapat dilepaskan dari aspek historis yang dibentuk antara elite penguasa baik pribumi atau yang melibatkan kalangan asing dan kepentingan yang bersifat menjaga teritori, yang terutama terkait dengan kepemilikan sumber daya alam.<sup>21</sup> Persaingan antara negara-negara kolonial dalam mengamankan wilayah jajahannya menjadi sebuah episode sejarah yang turut menentukan penciptaan garis demarkasi yang memisahkan kedua bangsa. Dalam perkembangannya, masing-masing negara berupaya semakin menguatkan makna perbatasan itu sebagai konsekuensi keberadaan *nation-state* yang memiliki seperangkat kepentingan yang berbeda.

### Hasil Kajian (Pembahasan dan Analisa)

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim penelitian ini, ditemukan bahwa persoalan rasa kebangsaan pada masyarakat perbatasan seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang amat sensitif untuk diperbincangkan. Anggapan seperti ini cenderung disampaikan oleh para tokoh masyarakat dan khususnya aparat desa di Badau, Aruk dan Temajuk. Bagi mereka, tidak ada masalah dengan masyarakat perbatasan akan rasa keindonesiaannya. Sebaliknya, beberapa kalangan yang berasal dari tokoh pemuda di tiga wilayah tersebut secara langsung ataupun tidak, menyatakan bahwa keindonesiaan masyarakat perbatasan teramat rapuh. Anggapan terakhir ini lebih dilatarbelakangi oleh kondisi perbatasan (yang serba terbatas) yang amat cair dan mudah untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak di luar Indonesia. Melalui kajian ini, tim menjawab berbagai anggapan kalangan di luar masyarakat perbatasan terkait rasa keindonesiaan yang rapuh dari masyarakat perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Penelusuran data dan fakta yang telah dilakukan dapat menggambarkan kondisi terkini rasa keindonesiaan masyarakat perbatasan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu (Kecamatan

---

Spring 1995, hlm. 77.

<sup>21</sup> Lihat misalnya Noboru Ishikawa, *Between Frontiers, Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland*, (Copenhagen: NIAS Press, 2010).

Badau) dan Kabupaten Sambas (Desa Aruk dan Desa Temajuk). Kedua Kabupaten tersebut merupakan kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Serawak, Malaysia.

### 1. Pemahaman atas Keindonesiaan

Secara garis besar, pemahaman umum terhadap keindonesiaan yang ditemukan pada masyarakat perbatasan di Kecamatan Badau dengan Desa Aruk dan Desa Temajuk tidak lah jauh berbeda. Bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut, keindonesiaan dipahami sebagai bentuk-bentuk<sup>22</sup> kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Aktualisasi rasa keindonesiaan bagi masyarakat perbatasan adalah suatu rasa yang akan muncul dari kepedulian negara/pemerintah terhadap kesejahteraan hidup mereka. Keindonesiaan yang hadir di masyarakat perbatasan tidak dapat lagi dianggap sebagai sesuatu yang dipaksakan kehadirannya, baik melalui doktrin militer atau pun doktrin kurikulum pendidikan. Imajinasi-imajinasi tentang NKRI sebagai harga mati yang menjadi pendekatan keamanan dalam mengelola perbatasan selama ini, harus dibarengi dengan pendekatan humanis yang mengedepankan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan.

Secara umum masyarakat di luar perbatasan amat memahami bahwa wilayah mereka adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemahaman itu mereka pun amat mengerti dengan kewajiban mereka menjaga keutuhan dan kehormatan bangsanya. Sikap bela negara amat kentara dan tidak perlu sepertinya dipertanyakan lagi dari masyarakat Badau dan Aruk serta Temajuk. Beberapa kalangan yang ditemui di Badau misalnya, menyebut bahwa mereka akan sangat melindungi tumpah darah Indonesia. Tidak sejengkal tanah pun akan mereka biarkan dirampas dengan semena-mena oleh negara tetangga.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bentuk-bentuk kehadiran negara dalam hlm ini adalah berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat perbatasan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi dan lain sebagainya.

<sup>23</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda di Desa Badau, yaitu Rockling, tokoh Pemuda dari suku Dayak Iban. Pernyataan ini juga disetujui oleh pemuda lain yang hadir

Persoalan kepemilikan dan tapal batas negara ini mejadi sesuatu hal menarik dalam kasus yang ditemui di Badau. Suku atau etnis yang hidup di wilayah perbatasan Indonesia (Desa Badau)-Malaysia (Kota Lubok Antu) pada PPLB Badau ini adalah sama, yaitu suku Dayak Iban. Ketika garis batas negara telah ditetapkan antara Indonesia dan Malaysia, maka banyak sekali ditemukan bahwa garis batas negara tersebut sama sekali tidak sejalan dengan garis batas kepemilikan tanah masyarakat Dayak Iban sebelum Indonesia dan Malaysia hadir sebagai sebuah negara berdaulat. Banyak posisi tanah penduduk dengan satu nama kepemilikan akhirnya terbagi menjadi dua akibat tapal batas dua negara tersebut.

Pada masa itu, masyarakat perbatasan tidak menganggap persoalan tidak sejalan tapal batas negara dan tapal batas kepemilikan tanah masyarakat Dayak Iban sebagai sebuah masalah besar. Mereka tidak lantas menuntut negara tempat mereka berdiam karena telah membuat posisi tanah mereka menjadi terbelah. Saling bertukar posisi kepemilikan tanah dijadikan sebagai solusi masyarakat Dayak Iban di dua negara. Kesepakatan ini berlangsung dengan baik tak lain juga disebabkan adanya kesamaan suku dan hubungan kekerabatan dari masing-masing pemilik tanah yang berada di garis batas Indonesia-Malaysia.

Hal yang menarik adalah, ketika terjadi persoalan adanya pencaplokan tanah dari negara tetangga, masyarakat Dayak Iban di Badau pun tidak tinggal diam, mereka akan mempertahankan kepemilikan tanah mereka tersebut. Karena bagi masyarakat Iban sendiri, tanah merupakan harga dari kehormatan keluarganya. Sehingga mereka akan sangat melindungi dan menjaga kehormatan itu.<sup>24</sup>

Jika ditelusuri lebih jauh, pembelaan masyarakat Dayak Iban di Badau atas persoalan kepemilikan tanah, sesungguhnya tidak berhubungan langsung dengan usaha bela negara. Dalam wawancara yang dilakukan tim

---

dalam wawancara ini yaitu Herolius dan Pilipus Piyan. Badau, 16 Agustus 2014.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Rockling, Tokoh Pemuda Suku Dayak Iban, Badau, 16 Agustus 2014.

terhadap beberapa tokoh pemuda<sup>25</sup> di Badau, mereka dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah persoalan tanah leluhur dan kehormatan mereka sebagai seorang Dayak Iban, jadi tidak ada hubungannya dengan negara. Namun tentunya ini menjadi hal yang baik untuk dapat “dimanfaatkan” oleh pemerintah dalam persoalan penjagaan tapal batas. Tingginya nilai kehormatan atas kepemilikan tanah sedikit banyak membantu pemerintah menjaga garis batas yang ada di wilayah Badau dengan wilayah Malaysia. Kondisi kepemilikan tanah sebagai harga kehormatan masyarakat Dayak Iban dan dilindungi oleh hukum adatnya, sesungguhnya merupakan aset berharga dalam menjamin keberlangsungan keindonesiaan di perbatasan Badau, Indonesia dengan Lubok Antu, Malaysia dalam hal garis batas teritorial. Dalam hal ini, secara tidak langsung, nilai-nilai adat terhadap perlindungan atas hak tanah memberikan sumbangsih atas usaha menumbuhkan dan memelihara rasa bela negara.

Meskipun pembelaan atas hak tanah dianggap tidak berhubungan langsung atas usaha bela negara, namun para tokoh yang ditemui di Badau menyatakan tidak serta merta bahwa rasa bela negara itu menjadi tidak ada pada diri masyarakat Badau.<sup>26</sup> Sejarah telah menunjukkan seberapa besar kecintaan masyarakat Badau pada Indonesia. Pengalaman pada masa perang paraku sekitar tahun 60-an bagi mereka adalah sebuah bukti bahwa mereka amat mencintai Indonesia. Pilihan yang tidak mudah kala itu adalah mereka harus memerangi masyarakat di Malaysia yang tak lain berasal dari etnis yang sama dengan mereka. Bahkan memiliki hubungan kerabat dengan beberapa masyarakat Dayak Iban di Badau. Pengorbanan yang telah diberikan oleh pendahulu mereka pada masa peperangan itu merupakan harga mahal yang tidak akan

---

<sup>25</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda di Desa Badau, yaitu Rockling, tokoh Pemuda dari suku Dayak Iban. Pernyataan ini juga disetujui oleh pemuda lain yang hadir dalam wawancara ini yaitu Herolius dan Pilipus Piyan. Badau, 16 Agustus 2014.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Luther Anak Idig, Ketua Dewan Adat Badau, di Badau, 16 Agustus 2014; Rockling, Tokoh Pemuda Iban, di Badau 16 Agustus 2014; Herolius, warga masyarakat, di Badau, 16 Agustus 2014; Pilipus Piyan, tokoh politik, di Badau, 16 Agustus 2014; Alfianto Kepala Kesbangpol Pemda Putussibau, di Putussibau, 20 Agustus 2014.

pernah mereka khianati dengan bertoleransi terhadap berbagai sikap negara tetangga yang merendahkan bangsa Indonesia.

Rasa keindonesiaan yang identik dengan semangat patriotisme ini pun ditemukan dalam rangkaian kajian ini di Desa Aruk dan Temajuk. Hal yang amat menarik adalah ketika adanya pemberitaan tentang pencaplokan sekitar 1000-an ha wilayah sebuah dusun di Desa Temajuk bernama Camar Bulan oleh pemerintah Malaysia. Kemarahan yang amat sangat dirasakan tidak hanya oleh pihak pemerintah daerah dan pusat, tetapi juga dirasakan masyarakat Desa Temajuk. Bagi mereka, hal yang dilakukan oleh pihak Malaysia tersebut sangat melukai hati mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Isu perbatasan yang menyinggung kesadaran kebangsaan ini mencuat ketika Gubernur Kalbar Cornelis dikejutkan dengan laporan stafnya soal kabar di lapangan bahwa ada klaim masuknya wilayah di Dusun Camar Bulan seluas 1.499 hektare ke dalam wilayah administratif Pemerintah Diraja Malaysia, yaitu wilayah Sematan, Serawak. Permasalahan berpindah patok tapal batas Indonesia-Malaysia di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Sambas 2011 yang lalu, justru menjadi penyemangat Pemerintah RI untuk membangun infrastruktur di wilayah tersebut.<sup>27</sup>

Suasana di Desa Temajuk, desa kecil di sudut utara Provinsi Kalimantan Barat itu mendadak lebih ramai dibanding hari-hari biasanya pada Jumat malam. Desa yang dihuni sekitar 1.432 jiwa itu telah kedatangan pejabat negara dari Jakarta, ibu kota Indonesia. Tamu-tamu penting tersebut adalah tiga menteri yakni Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie. Adanya kedatangan para menteri pemerintahan Presiden SBY yang lengkap dengan “unsur-unsur” pendukung seperti pejabat terkait di instansi masing-masing menjadi hal yang sangat penting bagi warga perbatasan. Gubernur Kalbar Cornelis dan Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi, telah bertindak sebagai tuan rumah dengan menyambut kedatangan

<sup>27</sup> Wawancara dengan narasumber AA, warga Temajuk, 15 Juli 2014.

rombongan yang datang menggunakan helikopter dari Pontianak. Berikut ini penjelasan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, saat itu:

“...Camar Bulan yang ada di desa Temajuk ini adalah wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. Sebagai seorang gubernur, tak sejengkal tanah pun akan saya serahkan kepada Pemerintah Malaysia. Traktat London, adalah perjanjian kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara. Traktat London ditandatangani 17 Maret 1824 dengan tujuan utama mengatasi konflik yang bermunculan seiring perjanjian sebelumnya, Perjanjian Britania – Belanda pada tahun 1814. Selain itu, ada pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Kinabalu, pada 1976, dan hasil pertemuan kedua negara di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1978 yang menyebut Camar Bulan masuk wilayah Malaysia segera dibatalkan karena bertentangan dengan Traktat London, Peta Belanda dan Peta Inggris. Tanah itu akan tetap saya pertahankan sebagai wilayah NKRI....”<sup>28</sup>

Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan juga bahwa ia telah mendapat informasi bahwa, Badan Survei dan Pemetaan Nasional, Kerajaan Malaysia, sudah memasukkan Camar Bulan ke dalam wilayah Malaysia. Dengan tegas ia meminta supaya tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya wilayah administrasi Kalbar. Hingga tulisan ini dibuat, wilayah Camar Bulan seluas 1.499 hektar masih dimasukkan oleh Malaysia sebagai bagian dari wilayah Sematan Serawak dan jalan keluar yang dipilih oleh Indonesia dan Malaysia dalam hal ini adalah dengan melakukan pengukuran kembali secara bersama. Status tanah di Dusun Camar Bulan hingga saat ini adalah *Outstanding Boundary Problems* (OBP).<sup>29</sup> Pada satu sisi kasus Camar Bulan menciptakan kegaduhan di tingkat lokal dan nasional serta hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, pada sisi lainnya kasus Camar Bulan memberikan dampak yang positif

<sup>28</sup> Informasi ini disampaikan oleh salah satu staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat dalam sebuah wawancara dengan wartawan JPNN. Lihat, “Peta Camar Bulan Ditandatangani Militer Indonesia-Malaysia”, 11 Oktober 2011, <http://www.jpnn.com/read/2011/10/11/105155/Peta-Camar-Bulan-Ditandatangani-Militer-Indonesia-Malaysia->, diakses pada tanggal 15 Desember 2014.

<sup>29</sup> *Ibid.*

bagi masyarakat di sana. Pembangunan yang sangat masif mulai berlangsung demi menjaga rasa keindonesiaan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Kini kondisi Temajuk cenderung mulai maju pesat, baik kondisi infrastruktur jalan yang kian mulus, ada perpustakaan desa, pasar yang kian ramai, penerangan listrik yang mulai menyebar walaupun sering ada keluhan, maupun masuknya sarana informasi dan komunikasi lewat jaringan seluler.

Pemahaman terhadap keindonesiaan juga beriringan dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap Indonesia. Kecintaan seseorang terhadap sesuatu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ia mengenal dan memahami sesuatu tersebut. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Kecamatan Badau, hampir sebagian besar masyarakat yang berasal dari generasi tua justru memiliki pengetahuan yang cukup tentang berbagai simbol dan atribut yang mencerminkan keindonesiaan. Seperti lambang negara, kepala negara, sejarah bangsa dan lain sebagainya.

Namun hal ini cukup mengejutkan ketika ditemukan fakta sebaliknya pada kelompok usia sekolah. Pengetahuan tentang letak geografis Indonesia beserta pulau-pulau dan provinsinya hingga tulisan ini diturunkan, belum lah utuh. Meskipun mereka dapat menyebutkan beberapa simbol negara penting, namun tentang sejarah bangsa Indonesia sendiri masih belum dapat dijelaskan dengan baik oleh murid-murid pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Pada level inilah sesungguhnya aktualisasi keindonesiaan memiliki persoalan dan pekerjaan rumah penting bagi pemerintah, baik lokal/daerah maupun pusat. Anak-anak usia sekolah ini adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan dititipkan cita-cita besar membangun Indonesia yang sejahtera dan berdaulat. Bagaimana kita bisa mengharapakan mereka untuk mencintai dan membangun bangsanya jika tidak didahului dengan penguasaan pengetahuan yang cukup dan utuh tentang sejarah bangsa, wilayah geografis dan simbol-simbol kenegaraan yang melekat padanya. Seperti telah disampaikan pada bagian sebelumnya, kecintaan seseorang pada sesuatu berawal dari pengetahuan yang ia miliki terhadap sesuatu tersebut.

Hal menarik yang juga ditemukan dalam kajian ini adalah adanya persepsi berbanding terbalik dalam benak kelompok usia sekolah ketika mendeskripsikan Indonesia dan Malaysia. Indonesia lebih banyak dideskripsikan dalam konotasi yang negatif, seperti, tidak beraturan, tidak disiplin, semua serba mahal, pemerintahannya tidak mempedulikan masyarakat perbatasan. Sedangkan Malaysia dideskripsikan dengan amat positif. Dalam kacamata mereka, Malaysia adalah sebuah negara yang memiliki kondisi yang jauh lebih disiplin, tata ruang wilayah di Malaysia jauh lebih rapi, bersih dan modern. Kondisi ini tentunya cukup mengkhawatirkan dalam konteks menciptakan dan memelihara kecintaan pada Indonesia.

Generasi muda di tiga wilayah penelitian saat ini selalu membandingkan kondisi di wilayahnya yang serba terbatas dengan kondisi yang penuh dengan kemudahan di wilayah tetangga. Sebuah hal yang lazim terjadi ketika seseorang melihat bahwa wilayah di sebelahnya lebih memberikan berbagai kemudahan, maka ia akan lebih berorientasi pada wilayah tersebut. Kondisi bagaimana keindonesiaan atau jiran kah yang lebih tampak dalam keseharian masyarakat perbatasan (Badau, Aruk dan Temajuk) akan dijabarkan di bawah ini.

## **2. Keindonesiaan dalam Keseharian**

Keseharian masyarakat perbatasan jika dilihat sepiintas tidak jauh berbeda dengan masyarakat di daerah lain. Keindonesiaan dalam hal penggunaan simbol-simbol ataupun atribut yang melambangkan Indonesia tetap dapat ditemukan di sini. Sebagai contoh, komunikasi yang dilakukan tetap menggunakan bahasa Indonesia, meskipun juga ditemukan penggunaan bahasa penduduk asli, yaitu bahasa Dayak.

Menurut Pabottingi, *nasion* secara lebih spesifik, atau dalam makna yang lebih praksis, berarti sebuah penghargaan kolektif sekaligus pengakuan atas solidaritas, inklusivitas, keadaban, kesaling-percayaan, dan pluralitas. Kehadiran *nasion* merupakan kehadiran kelimanya yang dapat terjadi melalui sebuah kerja-kerja konkrit. Kelima prinsip itu pada hakekatnya merupakan nilai-nilai dasar yang diturunkan dari satu generasi ke generasi

lainnya.<sup>30</sup> Nilai-nilai solidaritas, inklusivitas dan sikap menghargai pluralitas dirasakan amat kental dalam keseharian masyarakat Badau, Aruk dan Temajuk. Masyarakat pada ketiga wilayah tersebut merupakan tipe masyarakat yang heterogen. Keberagaman suku yang ada di Indonesia dapat ditemukan di sini. Suku asli tidak terlihat mendominasi kehidupan masyarakat Badau, Aruk dan Temajuk. Kehidupan yang harmonis dan cair tampak dalam bentuk saling meleburnya seluruh unsur masyarakat dalam berbagai kegiatan. Baik kegiatan yang bersifat adat maupun keagamaan.

Meskipun dalam wujud sikap dan pola kehidupan masyarakat perbatasan dalam kajian ini memperlihatkan warna keindonesiaan yang cukup kental, namun penggunaan berbagai produk penunjang kehidupan mereka masih didominasi produk-produk dari negeri jiran. Persoalan ketergantungan ini tidak hanya dikarenakan persoalan infrastruktur jalan yang lebih mudah ke wilayah tetangga, tetapi pada persoalan stigma yang tercipta pada kualitas produk-produk antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai contoh, penggunaan gas untuk memasak dengan merek Petronas lebih dipercayai kualitasnya oleh masyarakat dibandingkan dengan gas merek Pertamina. Stigma ini tidak hanya beredar dalam pemahaman masyarakat biasa, bahkan pejabat kabupaten pun memiliki anggapan yang sama.

Jika ditelusuri lebih jauh, kondisi ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama lebih bersifat internal, ketidakjujuran isi tabung gas seperti ini banyak sekali ditemukan, tidak hanya terjadi di wilayah perbatasan. Di sisi lain, faktor isi yang mendekati tepat dan harga yang lebih murah dari gas yang diproduksi oleh Malaysia, juga menjadi faktor kedua yang membuat masyarakat lebih memilih gas produksi negara jiran tersebut.

Produk-produk yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di Badau, Aruk dan Temajuk berupa bahan makanan, hampir sebagian besar berasal dari Malaysia. Baik itu telur, beras, gula dan minyak goreng, makanan ringan, air mineral dan lain sebagainya. Namun, yang cukup menarik adalah ketika penulis mencoba melihat toko-toko yang menjual kebutuhan sehari-hari di Badau,

terdapat beberapa toko yang menjual produk-produk Indonesia. Di toko-toko tersebut hampir tidak ditemukan barang-barang yang merupakan produk dari jiran.<sup>31</sup>

Kondisi seperti ini tidak ditemukan di Aruk dan Temajuk, hampir sebagian besar toko ataupun warung yang ada di wilayah tersebut lebih banyak menjual produk-produk Malaysia. Perbedaan kondisi penyebaran barang-barang produk Indonesia dan Malaysia yang ada di Badau, Aruk dan Temajuk sangat dipengaruhi oleh baik dan buruknya akses jalan yang menghubungkan daerah-daerah tersebut dengan wilayah ibukota Kabupatennya. Hampir 60 persen jalan yang menghubungkan Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan Kecamatan Badau dapat dikatakan cukup layak, dalam artian waktu tempuh yang sebelumnya 12 jam, saat ini dapat ditempuh hanya dalam waktu 5 jam saja. Hal ini sangat berkebalikan dengan kondisi jalan yang menghubungkan dusun Aruk dan Temajuk dengan Sambas Selatan (ibukota Kabupaten Sambas), dimana hanya sekitar 40 persen yang dalam kondisi layak.

Pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat di perbatasan (Badau, Aruk dan Temajuk) yang hampir sebagian besar didominasi oleh produk-produk dari Jiran tidak serta merta menjadi ukuran utama bahwa keindonesiaan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Tentu, kondisi tersebut amat dipengaruhi oleh kondisi perdagangan yang bebas masuk kewilayah Indonesia maupun Malaysia sebagai akibat fleksibilitas lalu lintas di PLB. Namun, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah, keakraban yang terlalu berlebihan atas produk-produk jiran dikhawatirkan dapat menimbulkan sikap keterasingan terhadap produk-produk negeri nya sendiri. Ibarat pepatah “Tak Kenal Maka Tak Sayang”.

Kondisi seperti di atas tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya indikator untuk melihat

<sup>30</sup> Mochtar Pabottingi, *op.cit*, hlm. 12.

<sup>31</sup> Saat dilakukan wawancara dengan pemilik toko, ia menyatakan bahwa tujuannya membuka toko dengan menjual hampir 80% produk Indonesia tak lain karena kerisauannya terhadap dominasi produk jiran dipusat-pusat perdagangan di Badau. Karena itulah ia bertekad untuk lebih banyak menjual produk-produk Indonesia meskipun dengan resiko membengkaknya biaya transportasi dalam mengangkut barang dagangan dari Pontianak. Wawancara dengan pemilik toko, Susanto, Badau, tanggal 18 Agustus 2014.

pemahaman masyarakat perbatasan terhadap keindonesiaan yang pada muaranya akan mampu menggambarkan rasa kebangsaan dihati dan pikiran mereka. Banyak faktor lain yang dapat menjadi gambaran pemahaman keindonesiaan masyarakat perbatasan, seperti pengetahuan tentang Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya. Kondisi ini bukanlah kesalahan masyarakat perbatasan di Badau, Aruk dan Temajuk ataupun wilayah perbatasan lainnya di Indonesia. Peran negara yang masih lemah dalam mensosialisasikan nilai-nilai dan simbol-simbol keindonesiaan menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak utuhnya keindonesiaan dalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan.

### 3. Upaya Membangun Keindonesiaan

Membangun nilai kebangsaan di wilayah perbatasan selain merupakan tugas penting negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat di wilayah itu sendiri. Karena itulah, tim membagi upaya membangun keindonesiaan ini dengan melihat peran kedua aktor tersebut. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam upaya membangun keindonesiaan di perbatasan adalah sebagai berikut:

#### ***Peran Pemerintah***

Pemahaman menyeluruh kepada seluruh unsur pemerintahan terkait paradigma memandang wilayah perbatasan sebagai beranda depan negeri ini harus terus digiatkan. Paradigma ini diharapkan akan mampu menumbuhkan rasa kepedulian dan semangat dalam membangun wilayah perbatasan, khususnya pada pemerintahan setingkat kecamatan dan desa. Karena kecamatan dan desa merupakan perangkat pemerintah terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Upaya menumbuhkan semangat membangun rasa kebangsaan masyarakat perbatasan sebaiknya juga diiringi dengan insentif yang mampu menumbuhkan sikap inovatif dan perilaku kreatif aparatur pemerintahan. Dengan demikian, perilaku negatif oknum-oknum pemerintah yang menyimpang dari aturan yang ada dapat diperbaiki. Disamping itu, perilaku aparatur pemerintahan yang cenderung bekerja

apa adanya setiap harinya (*business as usual*), juga mesti dibenahi.

Membangun di wilayah perbatasan tidak dapat dipandang sebagai sebuah pembangunan yang normal. Perlu sebuah gerakan pembangunan yang menyeluruh dan dalam skala besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Beberapa aspek yang membutuhkan perhatian lebih adalah:

#### - ***Pembangunan Infrastruktur Jalan***

Akses jalan amat penting untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mobilisasi sosial masyarakat perbatasan dengan warga dari wilayah lain di Indonesia.

#### - ***Pembangunan Fasilitas Kesehatan***

Minimnya fasilitas kesehatan di wilayah Badau, Aruk dan Temajuk seringkali menjadi alasan warga dari wilayah-wilayah tersebut untuk berobat ke negeri jiran. Mereka menyebut bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan kesehatan di Malaysia jauh lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Ukuran murahness biaya ini diukur oleh warga dengan menggabungkan biaya transportasi, akomodasi dan pelayanan kesehatan. Jika mereka hendak mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dari pelayanan yang diberikan pada tingkat puskesmas, mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menuju ke ibukota kabupaten dan lebih besar lagi menuju ibukota provinsi.

Hal ini sangat berbeda jika mereka melakukan pengobatan di salah satu kota di Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Jarak tempuh dari desa/dusun terluar Indonesia dengan kota perbatasan wilayah Malaysia hanya sekitar 30 menit hingga 1 jam saja, sehingga biaya transportasi tidak terlalu besar. Kemudian mereka pun memiliki sanak saudara berasal satu suku (Dayak dan Melayu) yang banyak di

wilayah seberang untuk dimintai bantuan menginap.

Pertimbangan selanjutnya adalah fasilitas kesehatan yang sudah sangat maju, dimana pada kota-kota di perbatasan Malaysia, level pelayanan kesehatannya hampir menyamai pelayanan kesehatan di tingkat provinsi untuk ukuran Indonesia. Pemerintah memiliki pekerjaan rumah amat besar dalam membenahi pelayanan kesehatan di perbatasan. Selain meningkatkan kualitas alat-alat kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan juga patut mendapatkan perhatian lebih. Insentif berupa jaminan kesejahteraan hidup bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong menghasilkan tenaga kesehatan yang bekerja dengan loyal dan sepenuh hati memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan.

- ***Pembangunan Fasilitas Pendidikan dengan Diiringi Perbaikan Kualitas Hidup Para Pendidik***

Dunia pendidikan juga memiliki peranan penting dalam upaya menumbuhkan dan menguatkan rasa kebangsaan. Sekolah adalah lembaga formal yang langsung menyentuh rangkaian pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Secara formal upaya ini dapat dimasukkan dalam beberapa mata pelajaran, seperti PPKN, Sejarah, Geografi dan Bahasa Indonesia. Dalam bentuk lain, nilai-nilai cinta tanah air juga dapat ditumbuhkan lewat kegiatan di luar pelajaran di kelas, seperti upacara ataupun pengayaan di dalam masyarakat.

Kualitas kehidupan para pendidik juga seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Banyak sekolah-sekolah di wilayah perbatasan yang tenaga pendidiknya tidak berstatus sebagai guru tetap. Tanpa mengecilkan peran besar para guru honorer, tetapi justru melalui kajian ini diharapkan agar guru-guru honorer yang memiliki sumbangsih begitu besar atas pengabdianya memajukan pendidikan

di wilayah perbatasan, haruslah mendapatkan porsi penghargaan yang selayaknya. Demikian pula dengan usaha yang terus menerus untuk meningkatkan jumlah pengajar disekolah-sekolah perbatasan. Perlakuan istimewa atas biaya hidup yang jauh berbeda antara kehidupan di wilayah perbatasan dan wilayah ibukota Kabupaten dan Provinsi selayaknya menjadi perhatian instansi terkait untuk melipatgandakan tunjangan hidup guru-guru yang mengabdikan di wilayah perbatasan. Pengabdian yang hanya dihargai lewat kata-kata pada akhirnya tidak dapat dihindari akan menggerus keluruhan pengabdian itu sendiri. Tak dapat dipungkiri bahwa pengajar adalah manusia biasa yang juga memiliki tanggungan hidup atas keluarganya. Inilah yang mestinya diperhatikan dengan seksama. Jika seorang guru tak perlu lagi memikirkan kekurangan dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya, maka secara tidak langsung pengabdian dalam mendidik pun diharapkan akan menjadi lebih baik.

***Peran Masyarakat***

Tokoh-tokoh adat dan agama memiliki peran yang amat penting dan strategis dalam upaya menumbuhkan rasa percaya dan kecintaan pada Indonesia. Tokoh-tokoh masyarakat ini dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan sebuah program pembangunan. Demikian penting peran ketua adat maka pihak pemerintah selalu berupaya membangun komunikasi yang intens dengan kelompok ini. Pemerintah secara sadar memberikan porsi tertentu kepada ketua adat sebagai elite informal untuk memainkan peran sebagai bagian dari jajaran elite.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Camat Badau<sup>32</sup> bahwa pemerintah tidak dapat mengabaikan para ketua adat dan sedapat mungkin membina hubungan baik dengan mereka. Hal ini tidak saja agar pelaksanaan

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ahmad Salafudin Camat Badau, di Badau, Kapuas Hulu, 18 Agustus 2014.

program pemerintah menjadi lebih efektif dilakukan, namun juga tidak melenceng dengan aspirasi masyarakat dan memperoleh legitimasi kultural. Tentu saja dengan adanya legitimasi dari tetua adat atas bergeraknya roda pemerintahan dan pembangunan maka sebagai efek lanjutnya upaya-upaya menunjukkan eksistensi pemerintah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat dilakukan.

Pihak swasta dalam hal ini juga memiliki peran yang cukup penting. Mereka dapat mengambil posisi sebagai pihak yang membantu membentuk jaringan ekonomi di wilayah perbatasan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti lapangan pekerjaan telah membantu menurunkan angka mobilisasi masyarakat diperbatasan ke negeri jiran.

#### **4. Tantangan Membangun Keindonesiaan**

Membangun rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap apapun yang menjadi atribut dari keindonesiaan bagi masyarakat perbatasan tidaklah mudah. Berbagai tantangan akan kerap ditemukan dalam upaya ini. Berikut adalah beberapa tantangan yang ditemukan dalam kajian ini.

1. Persepsi bahwa Malaysia itu jauh lebih unggul dalam banyak hal tetap ada. Posisi Malaysia sebagai negara tetangga yang amat baik mengurus warganya di perbatasan memiliki efek tidak langsung terhadap upaya membangun keindonesiaan. Ketimpangan bagaimana Malaysia begitu unggul dalam mengurus warganya selalu menjadi ukuran bagaimana semestinya negara memperlakukan rakyatnya. Perasaan sebagai “anak tiri”, kerap terlontar dari hampir keseluruhan narasumber yang ditemui.
2. Realisasi pembangunan di wilayah perbatasan oleh pemerintah daerah dan pusat. Kesiapan pemerintah daerah dan pusat dalam merealisasikan berbagai prioritas pembangunan di wilayah perbatasan cukup menjadi faktor yang dapat mengganggu upaya membangun

keindonesiaan. Persoalan SDM yang memiliki pengetahuan dan *skill* yang terbatas, infrastruktur penunjang program pembangunan, hal-hal inilah yang sepatutnya dikelola oleh negara agar kelancaran pembangunan perbatasan dapat berjalan dengan baik. Persoalan internal pada lembaga pemerintah lainnya yang kerap terjadi adalah lemahnya aturan main, tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, sumber daya manusia, kepemimpinan, ataupun problematika koordinasi.

Pemerintah pusat telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dimaksudkan agar mampu mempercepat pembangunan perbatasan. Namun, BNPP sebagai lembaga yang khusus dibentuk oleh pemerintah untuk mensinkronkan dan melakukan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan sejatinya tidak dapat berbuat terlalu banyak. Meskipun program prioritas telah ditempatkan dimasing-masing wilayah perbatasan, namun fungsi dari badan ini yang hanya sebagai lembaga koordinatif, membuat mereka tidak bisa melakukan intervensi terhadap implementasi program tersebut yang dijalankan oleh K/L teknis.

3. Tantangan menumbuhkan rasa keindonesiaan ini tidak hanya berasal dari faktor eksternal, namun juga faktor internal di wilayah perbatasan. Seperti kasus yang terjadi di Badau, peran hukum adat kerap melampaui hukum positif negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa narasumber bahwa dalam banyak kasus, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat diserahkan pada hukum adat terlebih dahulu untuk penyelesaiannya dan peran hukum positif hanya bersifat pelengkap saja, yang kerap tidak dibutuhkan.

Pola pikir masyarakat perbatasan yang masih belum mendahulukan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya juga menjadi tantangan yang cukup berat. Meskipun pemerintah menyediakan

fasilitas pendidikan yang memadai, namun jika tidak diiringi kesadaran akan pentingnya pendidikan, maka upaya meningkatkan kualitas pendidikan diperbatasan tidak akan mungkin tercapai. Dengan demikian pendekatan tidak hanya dilakukan bagi anak-anak yang menjalani pendidikan tetapi juga pada orang tua yang memiliki anak-anak tersebut.

## Penutup

Tulisan ini secara substansi melengkapi penelitian lapangan di kecamatan Badau dan desa Aruk/Temajuk. Meskipun dari segi pengetahuan tentang tokoh sejarah atau figur nasional tidak memadai dibandingkan dengan warga yang berada di pusat pendidikan yang lebih maju di kota, rasa nasionalisme penduduk Indonesia di perbatasan itu tidaklah kurang. Dibandingkan dengan warga Malaysia di daerah perbatasan, justru orang Indonesia lebih bersemangat. Kalau pun ada suara sumbang terhadap pemerintah, itu lebih banyak disebabkan pembangunan yang belum terwujud dengan baik di daerah itu.

Upaya pemerintah untuk membangun telah ditunjukkan dengan pengucuran dana yang cukup besar untuk desa Temajuk misalnya. Sayangnya itu baru dilaksanakan setelah beberapa kasus sengketa perbatasan mencuat, ketakutan akan kehilangan daerah negara menyebabkan perhatian mulai diarahkan ke daerah terpencil di ujung barat pulau Kalimantan itu. Ironisnya sebagian dari proyek itu tidaklah bermanfaat langsung kepada rakyat setempat. Bila yang dibutuhkan rakyat di perbatasan yang bekerja sebagai petani adalah pupuk, maka kebutuhan atas gedung perpustakaan yang masih minim buku serta jarang pengunjung sebaiknya ditinjau kembali. Para pejabat pemerintah harus lebih sering turun ke bawah mendengarkan apa sebetulnya yang diinginkan dan diperlukan masyarakat.

Apabila ditanyakan tentang pendekatan mana yang lebih baik diambil untuk daerah perbatasan, pendekatan keamanan, ekonomi atau budaya, maka jawabannya jelas, semuanya diperlukan. Pendekatan keamanan dan hukum perlu bila terdapat kasus sengketa perbatasan. Pengamanan termasuk patroli militer di daerah perbatasan harus dilakukan. Namun pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan pula bahwa

ketegasan pemerintah dalam hal ini Presiden juga penting dalam mengatasiperselisihan masalah perbatasan. Pendekatan ekonomi tentu jangan hanya menjadi akibat dari mencuatnya kasus sengketa patok tanah, tetapi memang disadari bahwa daerah perbatasan itu perlu dibangun agar kesejahteraan masyarakat di sana jangan sampai tertinggal secara mencolok dari negara tetangga.

Pendekatan budaya telah dijalankan selama ini oleh masyarakat di daerah perbatasan. Dalam kesehariannya mereka selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Upacara ritual dan gotong royong telah dipraktekkan penduduk antar negara. Selama ini mereka dengan bebas keluar masuk daerah kedua negara dengan hanya sekedar melapor pada pos polisi terdepan. Pembuatan pos lintas dengan pengisian dokumen resmi sebetulnya untuk mengingatkan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang akan pergi ke negara lain. Jadi penumbuhan kesadaran kebangsaan sudah dimulai dari kebijakan ini.

Dalam berinteraksi sosial antara warga Malaysia di Teluk Melano dengan penduduk Indonesia di Temajuk, hubungan itu timbal balik, demikian pula ketika mereka melakukan gotong royong. Namun dalam arus barang dan orang, maka arahnya umumnya satu, dari Indonesia ke Malaysia. Hal ini disebabkan tingkat perekonomian Malaysia yang lebih tinggi dari Indonesia dan berakibat pula mata uang Malaysia ringgit lebih kredibel dibanding rupiah. Bahkan mahar pernikahan umumnya lebih tinggi di Teluk Melano ketimbang di Temajuk. Jadi pemakaian ringgit itu bukanlah menunjukkan ekspresi kebangsaan warga Indonesia itu di perbatasan rendah, tetapi lebih karena persoalan praktis dan ekonomis. Ishikawa mengibaratkan hal ini sebagai tekanan osmosis pada negara bangsa, apabila bersinggungan, maka cairan yang konsentrasinya lebih encer akan menembus selaput tipis untuk bercampur dengan cairan yang konsentrasinya lebih padat.

## Daftar Pustaka

### Buku

Dominique, Maria. 2012. *Ancaman di Batas Negeri Kostrad di Perbatasan Entikong (Indonesia-*

- Malaysia*). Jakarta: Rene-Book dan Mardom untuk Kostrad.
- Fredrick Barth (Ed). 1969. *Ethnic Groups and Boundaries: Social Organization of Cultural Difference*. London: Allen & Unwin.
- Gellner, Ernest. 1965. *Thought and Change*. Chicago: University of Chicago Press.
- Guibernau, Montserrat dan John Rex (Eds.). *The Ethnicity Reader Nationalism, Multiculturalism and Migrations*. Cambridge: Polity Press.
- Ishikawa, Noboru. 2010. *Between Frontiers, Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland*. Copenhagen: NIAS Press.
- M. Safitri, Ririh. *Disfungsi Negara di Wilayah Perbatasan: Studi tentang Melemahnya Nasionalisme di Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Nodia, Ghia. 1998. "Nasionalisme dan Demokrasi," dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner (Eds). *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*. Bandung : ITB.
- Noor, Firman (Ed). 2007. *Nasionalisme, Demokratisasi dan Sentimen Primordialisme*. Jakarta: P2P LIPI.
- Pabottingi, Mochtar. 2000. *Lima Palang Demokrasi Satu Solusi: Rasionalitas dan Otosintresitas dari sisi Historis-Politik di Indonesia*. Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbang Politik dan Kewilayahan-LIPI. Jakarta: PPW-LIPI.
- Renan, Ernest. 1990. "Qu'est-ce qu'une nation" (What is *nasion*?). Terjemahan oleh Martin Thom dalam H.K Bhabha ed. *Nation and Nationalism*. London and New York: Routledge.
- Jurnal**
- Conversi, Daniele. 1995. "Reassessing current theories of nationalism: nationalism as boundary maintenance and creation", *Nationalism and Ethnic Politics* 1(1).
- Surat Kabar dan Website**
- "Pemerintah Harusnya Malu, Warga di Perbatasan Rame-rame Cari Kerja di Malaysia." 30 April 2012. <http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-harusnya-malu-warga-di-perbatasan-rame-rame-cari-kerja-di-malaysia/19635>.
- Muhammad, Djibril. "Warga RI di Perbatasan Lebih Mudah Bertransaksi dengan Ringgit." 9 Desember 2011. <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/12/09/lvxxb7-warga-ri-di-perbatasan-lebih-mudah-bertransaksi-dengan-ringgit>.
- Hayat, Nurul. "Warga Perbatasan Masih Sekolahkan Anak Di Malaysia." 13 Oktober 2013. <http://www.antarakalbar.com/berita/317022/warga-perbatasan-masih-sekolahkan-anak-di-malaysia>.
- "Peta Camar Bulan Ditandatangani Militer Indonesia-Malaysia." 11 Oktober 2011, <http://www.jpnn.com/read/2011/10/11/105155/Peta-Camar-Bulan-Ditandatangani-Militer-Indonesia-Malaysia->.